

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Bidang Teori**

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan dalam jangka panjang suatu negara dalam kemampuannya untuk menyediakan berbagai jenis barang – barang ekonomi penduduknya. Kemampuan ini berkembang sesuai dengan majunya teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro (2009), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pertumbuhan ekonomi berpusat pada proses peningkatan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan dikatakan menyangkut mengenai perkembangan dengan dimensi tunggal, dan diukur dengan hasil produksi dan pendapatan masyarakatnya yang meningkat.

Pembangunan ekonomi di Indonesia sudah lama dilakukan, dan pembangunan inipun sudah dilakukan dengan berbagai macam teori dan berbagai macam pendekatan yang diterapkan, akan tetapi masih belum bisa menyelesaikan masalah yang mengancam keberlangsungan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi akademisi untuk melakukan penelitian dan mencari akar permasalahannya.

Sebagaimana yang kita tahu, pembangunan ekonomi sangat erat kaitanya dengan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama pembangunan sendiri adalah guna menciptakan kemakmuran masyarakat dan untuk menciptakan meratanya kesejahteraan. Negara dapat dikatakan sukses dalam pembangunan, yaitu ketika masalah kemiskinan, distribusi pendapatan serta pengangguran dapat diselesaikan. Todaro (2009) mengungkapkan bahwa *Gross Domestic Product/Product Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun ketika dipelajari lebih jauh, bukanlah GNI (*Gross National Income*) yang perlu ditumbuhkan, tetapi lebih kepada siapa saja yang ikut berperan untuk menumbuhkan GNI tersebut. Apakah hanya sebagian orang saja, ataukah banyak orang yang ikut berperan

dalam menumbuhkan GNI. Apabila hanya sebagian saja, maka manfaat dari menumbuhkan GNI inipun hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil orang saja dan akan berakibat pada ketimpangan pendapatan dan *gap* akan semakin jauh antara si kaya dan si miskin (Todaro dan Stephen C. Smith, 2009). Oleh karenanya dalam pertumbuhan ekonomi yang terpenting adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, atau dengan kata lain adalah bagaimana tingkat kualitas dari pertumbuhan itu sendiri.

Menurut Sukirno (2005), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang

mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

Mankiew sudah pernah mengemukakan pendapatnya sebelum Todaro mengemukakan pendapat mengenai distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output. Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output adalah merupakan fungsi dari faktor produksi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat, maka aliran pendapatan kepada rumah tangga mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output ini dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja dan mampu meningkatkan upah, sehingga terjadilah tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ravallion (1997), Son dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004), yang mendukung teori dari Todaro dan Mankiew, mengambil kesimpulan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan terjadi jika hanya ketimpangan relatif tinggi. Maka bagi beberapa negara yang ketimpangannya rendah atau sedang, dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan (Agussalim, 2009).

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini, yaitu : Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan Neo Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dan Teori Pertumbuhan Kuznet.

#### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Menurut Adam Smith membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : Pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu :

##### a. Sumber Daya Alam yang Tersedia

Apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output. Sebaliknya pertumbuhan output akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.

##### b. Sumber Daya Insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.

##### c. Stok Barang Modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

## 2. Teori Pertumbuhan NeoKlasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi;
- b. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi ;
- c. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi.

## 3. Model Pertumbuhan Interregional

Model pertumbuhan interregional menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen yang berarti tidak terikat kepada kondisi internal perekonomian wilayah. Model ini hanya membahas satu daerah dan tidak memperhatikan dampak dari daerah lain, maka model ini disebut dengan model interregional. Teori ini sebenarnya merupakan perluasan dari teori basis ekspor sehingga diasumsikan selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi bersifat eksogen dan saling terkait dengan satu sistem dari daerah lain. Teori neoklasik berpendapat faktor teknologi ditentukan secara eksogen dari model. Kekurangan dalam keberadaan teknologi ini yang menyebabkan munculnya teori baru yaitu teori pertumbuhan endogen.

#### 4. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan penyempurnaan dari analisis Keynes yang dianggap kurang lengkap. Dalam teori ini Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini ingin menunjukkan syarat yang dibutuhkan supaya perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Arsyad,1999).

Harrod-Domar (dalam Sukirno,2005), menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ketahun harus selalu naik.

#### 5. Teori Pertumbuhan Kuznet

Pertumbuhan ekonomi Kuznet menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan dibidang teknologi, kelembagaan dan penyesuaian ideologi.

Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisisnya menambahkan enam karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu :

- a. Tingginya tingkat pendapatan perkapita
- b. Tingginya produktifitas tenaga kerja
- c. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi
- d. Tingginya faktor transformasi sosial ideologi
- e. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar

- f. Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas

## **2.2 Kemiskinan menurut Teori**

Kemiskinan jika didefinisikan menurut artinya adalah ketidak mampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan minimal dari suatu standar hidup tertentu. World Bank (2010) kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari berbagai dimensi didalamnya. Dimensi ini mencakup didalamnya yaitu ketidakmampuan mendapatkan barang dasar, penghasilan rendah, dan layanan hidup yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kegiatan ekonomi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.



Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Ukuran dalam penentuan kemiskinan untuk melihat suatu fenomena kemiskinan disuatu daerah adalah dengan insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan ini adalah presentasi penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Selain dimensi pendapatan, kemiskinan juga dapat dilihat dari peluang untuk memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain – lain.

Menurut BPJS (2013), dikatakan bahwa penduduk dikatakan miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita rata – rata yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah hasil dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan diartikan sebagai makanan yang dikonsumsi masyarakat dan diukur dengan 2100 kalori perhari per orang. Sedangkan untuk garis kemiskinan non

makanan, diartikan sebagai barang non komoditi meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Todaro (2009) kemiskinan yang terjadi di negara berkembang yakni akibat dari interaksi yang terjadi dengan 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara – negara berkembang terbilang rendah yang diakibatkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang lambat.
2. Pendapatan perkapita negara berkembang juga tergolong masih rendah dengan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan tergolong stagnan.
3. Distribusi pendapatan disuatu negara yang sangat timpang dan tidak merata.
4. Mayoritas dari penduduknya berada tertekan dibawah garis kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan buruk dan sangat terbatas, gizi kurang dan banyaknya wabah penyakit, sehingga angka kematian bayi di berbagai negara berkembang berada di level sepuluh kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di negara berkembang dan kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari

*Chambers* menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah

sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

#### 5. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Kemiskinan menurut jenisnya dibedakan menjadi dua jennis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif:

##### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau dikatakan kemiskinan mutlak adalah berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diterjemahkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal pada suatu waktu dan kondisi tertentu untuk keberlangsungan hidupnya.

Kemiskinan absolut ini bisa diartikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimal adalah garis pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin.

## 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif pada dasarnya merujuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Jadi mereka yang berada dilapisan terbawah dalam prosentase derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Artinya, mereka dapat dikatakan miskin, ketika dia sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup, tetapi tingkat pemenuhannya berada di lapisan terbawah.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan. Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.

2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Kemiskinan Merupakan salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di negara manapun. Kemiskinan sendiri dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standart, pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. *Gap* yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin di Indonesia semakin besar, yang disebabkan oleh disparitas antar daerah akibat dari tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi salah satu akar masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Jumlah pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2013. Tercatat bahwa tahun 2001, merupakan angka tertinggi pengangguran yang terjadi di Indonesia yakni sebesar 10,45%. Sedangkan angka terendah dari kemiskinan tercatat terjadi pada tahun 1994 yaitu sebesar 5,08%. Faktor yang sangat memiliki dampak dalam turunnya angka kemiskinan pendapatan (*income poverty*) adalah pertumbuhan ekonomi (Wahyudi,

2002). Menurut studi yang telah dilakukannya, turunnya angka kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika dikaji secara prinsip, pengentasan kemiskinan menjadi syarat pertama terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan syarat kedua yang harus dipenuhi adalah jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut adalah *pro poor*.

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95). Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat,

seperti keluarga, kelompok – kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2009). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu Negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” (Edi Suharto, 2009,138).

## 2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural (Cheyney, O'Brien dan Belgrave (1998:79). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (Cheyney, O'Brien dan Belgrave (1998:79). Pendekatan ini juga menekankan pada



kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95).

Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

### 3. Keberfungsian Sosial

Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan, oleh karenanya timbul pendekatan lainnya untuk menutupi kelemahan tersebut, yaitu pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan ketiga ini lebih mengarah pada pendekatan demokrasi sosial (Edi Suharto 2009).

Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Salah satunya teori yang mendukung paradigma keberfungsian sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Baker, Dubois, dan Miley. Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini individu dianggap sebagai subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.

Pendekatan ini memandang kelompok miskin bukan sebagai objek yang pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini adalah individu yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini dapat dijelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan, dan

jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang dimiliki si miskin dan bukan pada apa yang tidak dimiliki si miskin.

Menurut Kuncoro (2012) mencoba mendefinisikan kemiskinan ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi. *Pertama*, dari sudut mikro, kemiskinan muncul dikarenakan terdapat ketidaksamaan dan kepemilikan sumberdaya yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. *Kedua*, kemiskinan muncul diakibatkan dari perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, serta keturunan, sehingga produktivitasnya akan rendah yang pada akhirnya akan mengakibatkan upah yang rendah. *Ketiga*, kemiskinan muncul dari akibat perbedaan akses dalam modal.

### **2.3 Konsep Dasar Pendidikan**

Pendidikan ialah usaha yang dilakukan atau sengaja diadakan baik langsung maupun secara tidak langsung untuk membantu anak dalam mencapai perkembangan dalam upaya pendewasaan (Purwanto, 1988). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Purwanto (1987) yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pimpinan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak – anak dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar dapat berguna bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat disekitarnya.

Menurut Prof Dr. John Dewey pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan

Menurut Mudyaharjo (2008) pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah, dengan melalui pengajaran atau latihan, kegiatan bimbingan, yang berlangsung didalam sekolah dan diluar sekolah sepanjang hidupnya, yang memiliki tujuan untuk menyiapkan anak didik supaya dapat memainkan peran pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Pendidikan dibagi tiga , yaitu:

1. Pendidikan Formal

Adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi jenjang pendidikan formal:

- a. Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
- b. Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas, Sekolah Menengah Atas (SMA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta bentuk lain yang sederajat.

- c. Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, dll.

## 2. Pendidikan Non Formal

Adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

## 3. Pendidikan Informal

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang memperoleh banyak pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Melalui pendidikan orang dapat bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya. Menurut Sumitro (1994), mengatakan bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur hidupnya secara wajar.

Pendidikan di Indonesia mempunyai banyak jenis , mulai dari pendidikan formal, nonformal dan informal. Berikut penjelasan dari masing – masing jenis

pendidikan dalam Arlen Etllng: (a) Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, (b) Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan\ pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa, (c) Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan teroganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang , dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. TPT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

## **2.4 Teori Lingkaran Kemiskinan**

Lingkaran kemiskinan dapat direpresentasikan sebagai pembentukan modal rendah yaitu investasi diakibatkan oleh banyak faktor-faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika tingkat pembentukan modal rendah atau di notasikan sebagai investasi secara teori akan berdampak kepada penurunan tingkat produktivitas. Dalam kondisi perekonomian domestic yang tingkat produktivitas rendah akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga ada korelasi yang sangat kuat ketika

produktivitas rendah secara teorinya akan berdampak kepada pendapatan penduduk atau masyarakat yang hubungannya secara negative. Karena adanya penurunan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas.

## **2.5 Konsep *Human Capital***

Malhotra dan Bontis (dalam Rahmawati dan Wulani, 2004), *Human Capital* merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Berbagai definisi mengenai *Human Capital* mengalami perkembangan. Peningkatan *human capital* ini dapat dilakukan dengan pelatihan berbasis pengetahuan yang berkelanjutan dan merumuskan pengembangan strategi setiap individu sebagai kontribusi untuk perusahaan. Dalam model *Ednogeneus growth*, *human capital* merupakan turunan dari teknologi.

Sampurno menyebutkan bahwa teori pertumbuhan endogen dikenal dengan "*innovation-based*" *growth theory* dan kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen. Teori ini menganggap bahwa modal intelektual adalah sumber dari teknologi. Modal intelektual merupakan salah satu *asset intangible* yang mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan untuk bertindak yang berdasarkan pengetahuan.

## **2.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kemiskinan**

Pendapat Bourgoignon mengenai pertumbuhan ekonomi dijabarkan lebih jauh oleh Dollar dan Kray (2001) dan Agussalim (2006) dimana menurut mereka pertumbuhan ekonomi akan dapat memberikan manfaat terhadap warga miskin jika pertumbuhan ekonomi ini disertai dengan beberapa kebijakan yang benar, contohnya adalah, penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam

perdagangan internasional, serta strategi dalam menanggulangi kemiskinan. Jika suatu negara berhasil dalam pertumbuhan ekonominya, maka kemungkinan besar angka kemiskinan di negara tersebut dapat ditekan, hal ini akan lebih sukses lagi ketika mendapat dukungan dari kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang tepat.

Fakta pendukung peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan dijelaskan oleh Bank Dunia dalam *World Development report* (1990). Bank Dunia memberika rekomendasi kebijakan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja guna mengentaskan angka kemiskinan.

Sejumlah penelitian mengatakan bahwa faktor pendidikan juga ikut berpengaruh terhadap kemiskinan. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan Priyo (2013) menunjukkan bahwa ketika tingkat lulusan pendidikan semakin tinggi maka angka kemiskinan juga ikut turun. Begitupun sebaliknya, ketika angka lulusan pendidikan turun, maka angka kemiskinan akan naik.

Menurut Jeffrey Sachs di dalam bukunya *The End of Proverty* salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005:245-265). Filosofis Amartya Sen, paham libertarianisme Nosick dan Jeffrey Sachs mengemukakan enam paket penuntasan kemiskinan, yaitu : 1) Kapital manusia (*human capital*) terutama dalam kesehatan, gizi, dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. 2) Kapital bisnis (*business capital*), sarana-sarana yang diperlukan di dalam transportasi untuk pertanian, industri dan servis. 3) Infra-struktur: jalan, tenaga listrik, air minum. Sanitasi, dsb. 4) Kapital alamiah (*natural capital*) berupa tanah pertanian, biodipersitas. 5) Kapital lembaga-lembaga publik seperti hukum dagang, hukum peradilan, pelayanan pemerintah. 6) Kapital ilmu pengetahuan



(*knowledge capital*) berupa *know how* ilmu dan teknologi yang meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan *natural capital*.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun tidak semua hasil penelitian menemukan hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Beberapa temuan juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan positif terhadap kemiskinan. Misalnya apa yang dikatakan oleh Ahluwalia dan Chenery (1974) bahwa sudah jelas sekarang bahwa lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara terbelakang hanya memberikan sedikit manfaat atau tidak sama sekali memberikan manfaat terhadap sekitar sepertiga dari populasi mereka ". Gagalnya pertumbuhan mereduksi kemiskinan disebabkan oleh gagalnya proses kebawah / *trickle down effect*. Gagalnya kesejahteraan (kue pembangunan) menetes kebawah membuat kemiskinan semakin dalam meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahun. Artinya hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan bukan hubungan kausalitas karena kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak mutlak menurunkan angka kemiskinan. Ada banyak hal / syarat yang harus terpenuhi untuk membuat pertumbuhan ekonomi itu inklusif dalam artian pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat bukan hanya kelas sosial tertentu dalam masyarakat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam mengamati perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia ada banyak peneliti yang memberikan perhatian terhadap ketimpangan pembangunan ini. Misalnya menurut Klassen (2005) dalam Agussalim (2009) pertumbuhan hanya dapat disebut *pro poor* jika tingkat pertumbuhan orang miskin berada diatas tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata. Dengan kata lain pertumbuhan relatif bisa berpengaruh terhadap orang miskin dalam artian pendapatan mereka relatif meningkat dibandingkan dengan kelompok pendapatan masyarakat lainnya. Hal tersebut senada namun dalam konteks yang lebih jelas dengan apa yang dikatakan oleh Ravallion (1997), Son dan Kakwani (2003) dan Bourgoignon (2004) bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Artinya bagi negara yang memiliki tingkat ketimpangan sedang apalagi rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan.

Dalam studi lain yang melihat hubungan pertumbuhan dengan kemiskinan dilakukan oleh Squire (1993) dalam Agussalim (2009). Ia melakukan studi ekonometrik dengan melakukan analisis regresi antara tingkat penurunan kemiskinan dengan tingkat pertumbuhan. Hasilnya, jika terjadi kenaikan 1% dalam pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah penduduk miskin (pendapatan dibawah 1\$/hari) sebesar 0,24%. Kemudian studi Squire dilanjutkan oleh Bruno, Ravallion dan Squire (1998) dengan melakukan analisis regresi terhadap 20 negara berkembang selama periode 1984-1993 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (1\$/hari) secara statistik dapat turun sebesar 2,12%. Dan dipertegas dengan hasil penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menyimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun *magnitude* dari pengaruh tersebut relatif tidak besar. Secara umum ditemukan bahwa kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengharapkan proses *trickle down effect* dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan.

Dengan menggunakan garis kemiskinan internasional USD 1 per orang maka Squire (1993) melanjutkan analisis untuk melihat korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan. Dengan melakukan studi ekonometrik dengan analisis regresi antara tingkat penurunan kemiskinan dengan tingkat pertumbuhan menunjukkan jika terjadi kenaikan 1% dalam pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin (pendapatan dibawah USD 1 per orang per hari) sebesar 0,24%. Namun penelitian yang dilakukan oleh Deininger dan Squire (1995-1996) tidak menemukan keterkaitan yang sistematis dan korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan. Studi mereka ini yang juga menggunakan data lintas negara sangat menarik karena tidak menemukan suatu keterkaitan yang sistematis walaupun relasi antara pertumbuhan PDB dan pengurangan kemiskinan positif. Kemudian dipertegas oleh Fields dan Jacobson (1989) dan Ravallion (1995) justru menemukan hal yang lebih ekstrim. Mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Apa yang dikemukakan Ravallion, dipertegas temuan Kakwani (2000). Dengan menggunakan data lintas negara di Asia (Thailand, Philipina Laos dan Korea), Kakwani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi kemiskinan. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh masyarakat non miskin sedangkan penduduk miskin tidak mengalami keuntungan yang sama besarnya dengan penduduk non miskin. Implikasi dari temuan itu,

Kakwani menyarankan bahwa pemerintah harus menerapkan *pro poor-growth strategy*.

Hal yang berbeda temukan oleh Penelitian Saeful Hidayat (2007) yang berjudul *“Pertumbuhan Ekonomi Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan: Estimasi Parameter Elastisitas Kemiskinan Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 1996-2005”*. Penelitian tersebut membahas tentang hubungan pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan panel data dan memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketidakmerataan pendapatan tetapi disisi yang lain pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan, bahkan peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tidak mengganggu efektifitas pengurangan kemiskinan. Artinya penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada ketidakmerataan pendapatan namun ketidakmerataan pendapatan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan. Meskipun terjadi ketimpangan pendapatan tetapi ini tidak berpengaruh pada efektifitas penurunan angka kemiskinan. Hal ini juga dikemukakan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2008) dengan judul penelitian *“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Temuannya juga mengatakan bahwa Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruhnya relatif tidak besar. Pertumbuhan tersebut menjadi syarat harus untuk mengentaskan kemiskinan namun syarat penunjangnya juga harus tetap terpenuhi untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2005) dalam Alawi (2006) menegaskan peranan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian tersebut menjelaskan hubungan yang negatif antara anggaran pendapatan terhadap jumlah orang miskin. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud dialokasikan guna membuat program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang ditemukan oleh Hasibuan diperkuat oleh Alawi (2006). Alawi menemukan bahwa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat memiliki korelasi yang negatif terhadap tingkat keparahan kemiskinan. Artinya semakin tinggi alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat maka akan menurunkan tingkat keparahan kemiskinan.

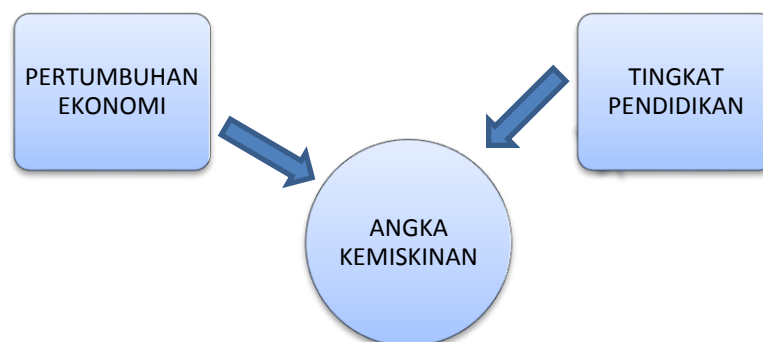
Dua penelitian diatas menjelaskan teori yang dikemukakan Todaro. Todaro (2001) dalam Alawi menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatannya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut tentu harus tepat sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin memburuk dan akan menghasilkan kekacauan sosial (social chaos).

Dalam temuan lain yang mempertegas beberapa temuan diatas yaitu temuan dari Fan (2004). Ia membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di negara berkembang. Selain itu pengeluaran pembangunan untuk teknologi dan modal manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di negara berkembang, khususnya negara-negara di

Afrika. Dalam penelitian sebelumnya Fan (et all 2004) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak secara langsung dan dampak tidak langsung terhadap penduduk miskin. Ia mengatakan dampak langsung pengeluaran pemerintah adalah manfaat yang diterima penduduk miskin dari berbagai program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja, serta skema bantuan dengan target penduduk miskin. Dampak tidak langsung berasal dari investasi pemerintah dalam infrastruktur, riset, pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk, yang secara simultan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan terutama penduduk miskin serta lebih terjangkau harga kebutuhan pokok.

## 2.8 Gambar Kerangka Pikir

Gambar 2.6: Kerangka Pikir



## 2.9 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
2. Diduga terdapat pengaruh yang negatif dari variabel pendidikan terhadap kemiskinan.